



Artikel

Collaborative Governance dalam Pembangunan Masyarakat Perbatasan di Kabupaten Merauke

Andri Irawan¹, Aenal Fuad Adam²

^{1 & 2} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musamus, Merauke, Indonesia.

* Korespondensi : andriawan@unmus.ac.id

Abstrak

Pembangunan kawasan perbatasan bertujuan untuk mewujudkan paradigma perbatasan sebagai beranda NKRI perlu dilakukan secara komprehensif, dalam arti tidak hanya melalui pendekatan kesejahteraan, akan tetapi juga dilakukan dengan pendekatan keamanan dan lingkungan. Untuk itu *collaborative governance* menjadi salah satu konsep yang dapat diterapkan dalam membangun daerah perbatasan. Penelitian ini dilakukan dengan dengan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif di Distrik Sota merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam pembanguna daerah perbatasan RI-PNG di Distrik Sota belum berjalan dengan baik. Indikator *starting condition* dan *Intermediate outcome* sudah terlihat dari beberapa program seperti terbentuknya kelompok masyarakat pengusaha madu pokos, pengolah minyak kayu putih, dan pengolah teh sarang semut. Akan tetapi, jika dilihat dari indicator *collaborative process* dan *institutional design* belum terjadi kolaborasi yang ideal antara pemerintah, swasta dan perguruan tinggi. Dimana terlihat bahwa segala kegiatan pemberdayaan masyarakat masih didominasi oleh pemerintah dalam hal ini Badan Pengelola Perbatasan Daerah, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, dan Balai Taman Nasional Wasur Kabupaten Merauke. Idealnya dalam sebuah proses *collaborative* harus terlibat pihak perguruan tinggi dan masyarakat sebagai pelaksana dan penyeimbang program-program yang diberikan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: *Collaborative Governance, Pembangunan Masyarakat, Kawasan Perbatasan.*

Abstract

The development of border areas aims to realize the border paradigm as the homeland of the Republic of Indonesia and needs to be carried out comprehensively, in the sense not only through a welfare approach but also through a security and environmental approach. For this reason, *collaborative governance* is one of the concepts that can be applied in developing border areas. This research was conducted using a descriptive method and a qualitative approach in Sota District, which is an area directly adjacent to Papua New Guinea. The results of the study indicate that *collaborative governance* in the development of the RI-PNG border area in the Sota District has not gone well. Indicators of starting conditions and intermediate outcomes have been seen from several programs such as the formation of community groups for Pokos honey entrepreneurs, eucalyptus oil processors, and ant nest tea processors. However, when viewed from the indicators of the collaborative process and institutional design, there has not been an ideal collaboration between the government, the private sector, and universities. Where it can be seen that all community empowerment activities are still dominated by the government, in this case, the Regional Border Management Agency, the Natural Resources Conservation Center, the Wasur National Park Center, and Merauke Regency. Ideally, in a collaborative process, universities and the community should be involved as implementers and balancers of the programs provided by the government in improving the welfare of the community

Keywords: *Collaborative Governance, Community Development, Merauke Border Area.*

Collaborative Governance dalam Pembangunan Masyarakat Perbatasan di Kabupaten Merauke

1. Pendahuluan

Perbatasan negara merupakan penjelmaan daripada kedaulatan bangsa dalam bangsa atau negara yang bersangkutan. Perbatasan juga mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada. Namun ironinya, saat ini sebagian besar wilayah perbatasan di Indonesia masih merupakan daerah tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas. Kondisi ini membuat masyarakat tidak berdaya sehingga kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan rendah. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat di kawasan perbatasan harus dilaksanakan karena perbatasan berkaitan dengan kedaulatan dan harga diri bangsa.

Indonesia mempunyai tiga provinsi wilayah perbatasan darat yang secara langsung bersinggungan dengan negara lain, yaitu Papua - Papua New Guinea, Nusa Tenggara Timur - Timor Leste, dan Kalimantan - Malaysia. Ketiga provinsi perbatasan darat tersebut memiliki karakter khusus, baik di lihat dari segi persoalan pembangunan maupun dari segi keamanan dan ketahanan nasional, terbatasnya, sarana-prasarana yang tersedia, seperti jalan, transportasi, telekomunikasi, mengakibatkan kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan terpencil.

Kabupaten Merauke menjadi salah satu daerah di Papua yang berbatasan langsung dengan Negara Papua Nugini. Seperti di daerah perbatasan lain, berbagai macam isu ketimpangan sosial ekonomi masih sangat melekat disana. Seperti isu tentang Infrastruktur, Perekonomian, Pendidikan, hingga kesehatan. Isu-isu tersebut sudah terjadi pada rentang waktu yang lama, akan tetapi sampai saat ini permasalahan atau isu tersebut masih relevan terjadi di wilayah perbatasan dan menjadi suatu permasalahan belum dapat diselesaikan dengan baik.

Pembangunan wilayah perbatasan adalah sebuah keniscayaan karena wilayah perbatasan menjadi wilayah terdepan dari sebuah negara. Seperti halnya wilayah perbatasan yang ada di Kabupaten Merauke yaitu Distrik Sota. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) telah selesai dikerjakan dan di resmikan Presiden pada tanggal 3 Oktober 2021 dengan harapan bahwa kawasan perbatasan merupakan beranda terdepan Indonesia yang mewakili wajah bangsa agar bisa menjadi representasi kemajuan Indonesia yang membanggakan seluruh masyarakat Indonesia. Dalam pidatonya Presiden mengatakan bahwa dengan wajah baru, dengan tampilan baru, dan juga yang tidak kalah penting dengan cara - cara pelayanan yang lebih baik yang menjadi cerminan komitmen dalam membangun kawasan perbatasan.

Dengan adanya pembangunan PLBN Sota ini merupakan potensi dan peluang yang dapat berkembang di daerah tersebut. Karena dengan adanya pembangunan PLBN ini harusnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dari berbagai aspek seperti Sosial, Ekonomi, dan Sumber daya alam yang dapat dikelola demi kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, yang sering terjadi di daerah perbatasan Sota ini tidaklah seperti apa yang diharapkan. Dimana masih sangat terlihat adanya kesenjangan sosial taraf hidup masyarakat yang rendah yaitu jika dilihat dari angka kemiskinan dan pengangguran lebih meningkat. Dari data yang dihimpun saat awal penelitian adalah masih ada 300 orang lebih masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan dibalik megahnya bangunan PLBN Sota tersebut. Oleh karena itu, sangat diperlukan berbagai inovasi pembangunan guna mempercepat penyelesaian isu-isu yang terjadi.

Percepatan pembangunan kawasan perbatasan dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak yang dalam ilmu administrasi disebut dengan konsep *collaborative governance*. Konsep *Collaborative Governance* sebagai sebuah basis alternatif dinilai mampu mewujudkan percepatan dan implementasi kebijakan pembangunan kawasan perbatasan. *Collaborative Governance* merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai stakeholder yang terkait untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama (Florini & Pauli, 2018).

Collaborative Governance dalam Pembangunan Masyarakat Perbatasan di Kabupaten Merauke

Pentingnya konsep *collaborative governance* dalam pembangunan kawasan perbatasan telah diungkapkan oleh (Keyim, 2015)(Keyim, 2018) dalam riset yang dilakukannya dan penelitian-penelitian terdahulunya dalam studi kasus dari masyarakat pedesaan pinggiran di Finlandia. Ia mengatakan bahwa pembangunan desa pariwisata yang dilaksanakan di daerah pinggiran Finlandia sangat dipengaruhi oleh pendekatan *Collaborative Governance* yaitu oleh beberapa determinan antara lain dari lembaga negara dan komunitas pedesaan yang ada disana.

Penelitian lain dilakukan oleh (Muhammad, 2017) di Provinsi Kepulauan Riau bahwa permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah perbatasan tersebut seperti penangkapan ikan ilegal, pertambangan serta perdagangan manusia diakibatkan oleh minimnya kerjasama antara berbagai elemen yang menjadi pengelola perbatasan. (Florini & Pauli, 2018) dalam penelitiannya menekankan bahwa dalam pembangunan berkelanjutan untuk mengentaskan kemiskinan di pedesaan di Asia tenggara perlu kolaborasi lintas sector antara pemerintah dan lembaga non pemerintah.

Dengan demikian, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis model pembangunan masyarakat kawasan perbatasan RI – PNG dengan menggunakan konsep *collaborative governance* selaku inovasi kebijakan pembangunan kawasan perbatasan. Hal ini disebabkan karena alasan desentralisasi yang lebih menekankan dimana daerah membangun dirinya sendiri dengan memanfaatkan kemitraan dengan lembaga negara, pihak swasta serta komunitas masyarakat yang ada di daerah tersebut. Sehingga dengan adanya peran serta dari masing-masing elemen akan mempermudah daerah pinggiran melaksanakan pembangunan berdasarkan atas kearifan lokal daerah tersebut.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena melalui penelitian kualitatif peneliti bermaksud untuk memperoleh gambaran yang mendalam tentang model pembangunan masyarakat perbatasan di Kabupaten Merauke dengan melihat fenomena-fenomena yang terjadi disana. Penelitian dilaksanakan di Distrik Sota Kabupaten Merauke karena beberapa kampung yang ada didalamnya merupakan kampung yang berbatasan langsung dengan Negara lain yaitu Papua Nugini.

Penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu; melakukan pengumpulan data penelitian melalui observasi, dokumentasi, serta memperkuat data dengan melakukan Focus Group Discussion (FGD). Data penelitian diperoleh dari informan yang terkait langsung dalam pembangunan masyarakat perbatasan melalui wawancara yang mendalam diantaranya: (1) Kepala Distrik Sota, (2) Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Merauke, (3) Kepala Balai Taman Nasional Wasur, (4) Kepala Kepolisian Sektor Sota, (5) Para Pelaku UMKM di Distrik Sota, serta (6) masyarakat yang menjadi sasaran dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014), dimana dalam analisis data terdapat tiga aktifitas yaitu: *condensation data*, *data display*, dan *conclusion drawing/ verification*.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Collaborative Governance dalam Pembangunan Masyarakat Perbatasan di Kabupaten Merauke

3.1.1. Starting Condition

Starting Condition adalah keadaan awal di mana *Collaborative Governance* dilaksanakan. Tahap awal mencakup konteks historis dari kolaborasi masa lalu, kemungkinan, dan insentif yang diharapkan dari proses *Collaborative Governance* (Chris Ansell, 2008). Pemerintah

Collaborative Governance dalam Pembangunan Masyarakat Perbatasan di Kabupaten Merauke

Kabupaten Merauke melalui Badan Pengelola Perbatasan Daerah dan Balai Taman Nasional Wasur Kabupaten Merauke telah melakukan kegiatan pembangunan di sektor perekonomian masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal yang ada di daerah perbatasan. Kegiatan 'membangun' oleh Pemerintah Kabupaten Merauke dalam bidang perekonomian misalnya adalah dengan memberikan pendampingan kepada masyarakat pengelola UMKM dalam bidang penyulingan minyak kayu putih, pengolah madu Pokos, Minyak buah merah, Minyak Kemiri Bakar dan Teh Sarang semut. Pemerintah berfokus pada pembangunan perekonomian UMKM karena melalui kegiatan ini dapat menjadikan usaha bagi masyarakat lokal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal setempat.

Selain itu, Kapolsek Sota juga memulai pembangunan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat lokal asli Papua untuk menanam cabai merah keriting dengan jumlah lahan yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini selain untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang paling penting adalah untuk memanfaatkan lahan tidur yang dimiliki oleh masyarakat yang selama ini tidak terpakai. Keuntungan berikutnya yang didapat dengan memberdayakan masyarakat ini adalah meminimalisir terjadinya kriminalitas di daerah perbatasan. Menurut penuturan Kapolsek Sota bahwa awal mula pemberdayaan itu dilakukan karena melihat kondisi pembangunan yang begitu megah di daerah perbatasan, akan tetapi didalam daerah perbatasan tersebut masih ada 300 orang lebih masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan. Maka melalui pemberdayaan inilah langkah awal untuk melakukan pembangunan masyarakat di kawasan perbatasan.

Kegiatan pembangunan bidang perekonomian kawasan perbatasan di Kabupaten Merauke tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah menjadi alasan utama pentingnya menjalin kerjasama dan elaborasi dengan berbagai entitas. Diantaranya adalah kerjasama dengan instansi pemerintah yang lain, organisasi swasta, akademisi dan komunitas masyarakat sipil lainnya. Konsep berjuang untuk mencapai tujuan bersama ini disebut *Collaborative Governance*. Peran pemerintah Kabupaten Merauke khususnya instansi di pemerintahan daerah masih sangat dominan dibandingkan dengan pihak swasta, perguruan tinggi, serta kelompok masyarakat itu sendiri.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Irawan & Tanzil, 2020) menyatakan bahwa sebenarnya program bantuan pengentasan kemiskinan di kawasan perbatasan telah banyak dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi program-program tersebut hanya sebatas program bantuan periodic yang setelah program selesai maka kegiatan di kampung tersebut juga selesai. Belum lagi program-program yang bersifat bantuan ini seringkali bertentangan dengan kebutuhan masyarakat setempat karena hanya sebagai penghabisan anggaran saja.

3.1.2. Collaborative Process

Proses Kolaborasi yang pertama adalah face to face dialogue atau pertemuan tatap muka. Pertemuan tatap muka adalah pertemuan pihak-pihak yang berbeda di satu tempat pada waktu yang sama, di mana terjadi interaksi langsung atau dua arah antara pihak-pihak yang berbeda untuk membahas isu-isu yang menjadi kepentingan bersama (Chris Ansell, 2008). Dari hasil penelitian pertemuan secara langsung di Distrik Sota Kabupaten Merauke sudah dilakukan akan tetapi belum maksimal. Bentuk *face to face dialog* tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain melalui pertemuan dan rapat. Akan tetapi, yang dilakukan adalah pertemuan-pertemuan yang bersifat interen, hanya masing-masing instansi melakukan rapat dan pertemuan tetapi tidak melibatkan instansi-instansi lain yang mempunyai kepentingan di wilayah perbatasan. Pertemuan tatap muka pernah dilakukan oleh beberapa instansi pemerintah dan masyarakat akan tetapi tidak melibatkan pihak Non-Government Organization (NGO). Padahal pihak-pihak tersebut juga menjadi bagian yang penting dalam pembangunan daerah perbatasan karena mereka saling melengkapi untuk keberlangsungan program pemerintah pada daerah perbatasan tersebut.

Collaborative Governance dalam Pembangunan Masyarakat Perbatasan di Kabupaten Merauke

Kemudian tahapan yang kedua adalah *Trust building* atau membangun kepercayaan. *Trust building* ini adalah strategi manajemen yang berfokus tidak hanya pada saat ini tetapi juga untuk kerjasama di masa depan. Membangun kepercayaan memiliki niat yang sama untuk mengejar kebijakan terbaik bagi semua pihak (Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2015). Membangun kepercayaan dimulai dengan menjalin komunikasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan ekonomi daerah perbatasan di Distrik Sota. Membangun kepercayaan masyarakat Distrik Sota sudah dilakukan oleh pihak Distrik dengan Kapolsek Sota yang selalu mengadakan pertemuan atau musyawarah dengan masyarakat secara berkala setiap saat. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut digunakan sebagai sarana untuk menginformasikan hal-hal yang penting dan didalam forum tersebut juga warga di berikan ruang untuk menyampaikan pendapat dan permasalahan yang sedang dihadapi warga. Keterbukaan informasi ini sebagai kunci dalam membentuk kepercayaan publik.

Pembangunan kepercayaan publik ini juga dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Kapolsek Sota yang selalu menjaga dan berbaur dengan masyarakat, bahkan kapolsek juga membuat masyarakat binaan di Distrik Sota dalam perkebunan kopi jenis excelsa. Petani kopi di Distrik sota dibina dan dibimbing dalam pembibitan, penanaman hingga masa pasca panen serta mencarikan pasar untuk penjualannya. Maka dari itu, dari hal-hal tersebut membuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menjadi meningkat. Selain itu,

Tahapan yang ketiga dalam proses kolaborasi adalah *Comitment to Process*, yaitu suatu komitmen atau kesepakatan untuk melaksanakan suatu proses tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan (Ansell & Gash, 2018). Keterlibatan bersama berarti bahwa kita saling mengandalkan untuk memecahkan masalah dan solusi, bahwa proses ini adalah kepentingan bersama, dan bahwa kita terbuka satu sama lain untuk saling menguntungkan . Keterlibatan ini berasal dari komitmen Pemerintah Distrik Sota bekerjasama dengan Kepolisian sector Sota memberikan ruang kepada masyarakat setempat untuk turut aktif dalam musyawarah perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.

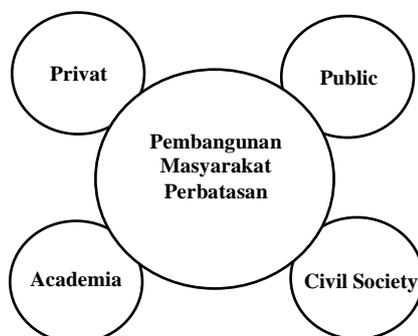
3.1.3. Institutional Design

Apabila kita berkaca pada konsep *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh (Chris Ansell, 2008), dengan lebih sedikit kontrol atas pembangunan dan lebih banyak keterlibatan pemangku kepentingan, konsep *governance* menjadi lebih penting. Proses *governance* memungkinkan interaksi berkelanjutan antara masyarakat dan negara. Penerapan konsep *governance* melibatkan unsur-unsur di luar pemerintahan yaitu masyarakat sipil, organisasi swasta, kelompok masyarakat, dan gerakan sosial lainnya.

Akan tetapi, dari hasil penelitian dilapangan yang didapatkan hasil bahwa dalam melaksanakan proses pembangunan daerah perbatasan tidak hanya cukup elemen pemerintahan, swasta dan masyarakat saja. Dibutuhkan peran kuat dari pihak perguruan tinggi untuk menganalisis kebijakan serta program-program yang tepat untuk daerah tersebut. Hal ini disebabkan dari setiap kampung yang ada di daerah perbatasan tersebut memiliki karakter yang berbeda-beda. Seperti kampung Wasur, Sota, Yanggandur, dan Rawa Biru yang masuk dalam kawasan taman nasional tentu berbeda dengan Kampung Onggaya, Tomer, Tomerau yang ada di sepanjang kawasan pesisir. Selengkapnya dapat digambarkan seperti di bawah ini:

Collaborative Governance dalam Pembangunan Masyarakat Perbatasan di Kabupaten Merauke

Gambar 1. Model Pembangunan Masyarakat Perbatasan



Seperti yang terlihat dalam gambar bahwa untuk melaksanakan program pembangunan masyarakat perbatasan perlu ada elemen-elemen yang saling menopang dan membangun kemitraan. Dalam model tersebut, setiap elemen lebih mandiri, masyarakat memiliki ruang dalam setiap program pembagunan, sedangkan akademisi (perguruan tinggi) adalah produsen pengetahuan baru, sektor swasta (industri) bertanggung jawab untuk menyerap dan menerapkan pengetahuan, dan pemerintah tunduk pada aturan dan regulasi. Mengacu pada konsep ini, model inilah yang lebih tepat menggambarkan hubungan antara pemerintah, masyarakat, swasta dan perguruan tinggi di pembangunan masyarakat di Kabupaten Merauke.

Akan tetapi, pada kenyataannya peran sektor swasta dan Perguruan Tinggi tidak signifikan dalam pembangunan perekonomian di Kabupaten Merauke. Hal ini terlihat dari program-program pengentasan kemiskinan untuk masyarakat perbatasan hanya di dominasi oleh pemerintah saja. Dalam sebuah kasus memang akademisi sudah mulai dilibatkan dalam beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat, contohnya adalah dalam pembuatan teh sarang semut yang dilakukan oleh kelompok masyarakat Kampung Wasur telah meminta akademisi dalam hal perhitungan dan analisis kandungan yang ada dalam setiap kemasan teh sarang semut tersebut. Dengan demikian, ini sudah menjadi langkah awal yang sangat bagus untuk melibatkan perguruan tinggi (akademisi) dalam proses kolaborasi dalam bidang perekonomian masyarakat lokal.

Seperti yang dikatakan (Cooke & Leydesdorff, 2006) penciptaan basis pengetahuan sangat bergantung pada sinergi tiga pelaku ekonomi utama: akademisi, bisnis, dan pemerintah. Akademisi bertanggung jawab untuk menciptakan hal baru, bisnis bertanggung jawab untuk menghasilkan kekayaan dan keuntungan, dan pemerintah bertanggung jawab untuk mengarahkan dialog pemangku kepentingan dan pembuatan kebijakan. (Organisation for Economic Co-Operation and Development, 2013).

3.1.4. Intermediate outcome

Intermediate outcome adalah hasil sementara dari proses yang sedang berlangsung dan telah menghasilkan manfaat juga nilai strategis (Chris Ansell, 2008). Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke sampai saat ini telah melakukan beberapa kegiatan seperti: 1) Pendampingan kelompok masyarakat pembudidaya dan pengolah Madu Pokos, Minyak Kayu Putih, Minyak Buah Merah, dan Teh Sarang Semut yang dilakukan pendampingan oleh Badan Konservasi Sumber Daya Alam Balai Taman Nasional Wasur Merauke; 2) Pendampingan petani kopi di Kampung Sota yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Sota; dan 3) Pendampingan pelaku usaha UMKM di Pos lintas Batas Negara Sota – PNG.

Collaborative Governance dalam Pembangunan Masyarakat Perbatasan di Kabupaten Merauke

Hasil sementara yang sudah didapatkan adalah peningkatan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan di kampung seperti telah adanya kelompok-kelompok usaha masyarakat dalam bidang pengelolaan hasil dari daerah setempat. Akan tetapi, dalam kelompok-kelompok tersebut hanya sebagian dari masyarakat yang terlibat. Padahal, Keterlibatan masyarakat dalam setiap pembangunan adalah sebuah keharusan (Newman, Barnes, Sullivan, & Knops, 2004). Seperti yang dikatakan oleh (Irawan, 2019) bahwa segala kegiatan dalam melakukan pembangunan tidak lepas dari peran serta masyarakat itu sendiri. Rendahnya minat masyarakat juga berkontribusi terhadap minimnya kerjasama antar program dan lintas sektoral dalam pelaksanaan program ekonomi ini. Keterlibatan masyarakat diyakini menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat keberhasilan program peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat merupakan motor penggerak dalam pelaksanaan setiap program.

5. Kesimpulan

Penelitian ini membahas tentang peningkatan perekonomian masyarakat lokal dengan model *collaborative governance* yaitu proses meningkatkan program ekonomi masyarakat dengan lintas sector. Sebab, pemerintah sendiri tidak akan mampu untuk menjalankan segala bentuk program pengentasan kemiskinan untuk masyarakat. Akan tetapi, *collaborative governance* pada pembangunan kawasan perbatasan belum berjalan dengan baik. Dari keempat indikator yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis model *collaborative governance* di perbatasan Sota – PNG masih ada yang belum terpenuhi.

Dari hasil tersebut, jika dilihat dari *starting condition* telah dilakukan dengan adanya program lintas sector yang dilakukan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Merauke dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang usaha kecil masyarakat. *Intermediate outcome* sudah terlihat hasil yang sudah diterima atas proses yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola daerah perbatasan terlihat dari beberapa program seperti terbentuknya kelompok masyarakat pengusaha madu pokos, pengolah minyak kayu putih, dan pengolah teh sarang semut.

Akan tetapi, jika dilihat dari indikator *collaborative process* dan *institutional design* belum terjadi kolaborasi yang ideal antara pemerintah, swasta dan perguruan tinggi. Dimana terlihat bahwa segala kegiatan pemberdayaan masyarakat masih didominasi oleh pemerintah dalam hal ini Badan Pengelola Perbatasan Daerah, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, dan Balai Taman Nasional Wasur Kabupaten Merauke. Idealnya dalam sebuah proses *collaborative* harus terlibat pihak perguruan tinggi dan masyarakat sebagai pelaksana dan penyeimbang program-program yang diberikan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Referensi

1. Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative Platforms as a Governance Strategy, 16–32. <https://doi.org/10.1093/jopart/mux030>
2. Chris Ansell. (2008). Collaborative Governance in Theory, (October 2008). <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
3. Cooke, P., & Leydesdorff, L. (2006). Regional Development in the Knowledge-Based Economy : The Construction of Advantage Regional Development in the Knowledge-Based Economy : The Construction of Advantage, (May 2014). <https://doi.org/10.1007/s10961-005-5009-3>
4. Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2015). An Integrated Framework for

Collaborative Governance dalam Pembangunan Masyarakat Perbatasan di Kabupaten Merauke

- Collaborative Governance An Integrative Framework for Collaborative Governance, (January 2012). <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
5. Florini, A., & Pauli, M. (2018). Collaborative governance for the Sustainable Development Goals, (October 2017), 1–16. <https://doi.org/10.1002/app5.252>
 6. Irawan, A. (2019). Model Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung Siaga Aktif di Kampung Salor Indah Distrik Kurik Kabupaten Merauke, 5(1), 40–60. Retrieved from <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/view/6990>
 7. Irawan, A., & Tanzil, L. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Perbatasan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Oleh :, 9(2), 129–139.
 8. Keyim, P. (2015). Collaboration and rural development in a tourism context, (August).
 9. Keyim, P. (2018). Tourism Collaborative Governance and Rural Community Development in Finland : The Case of Vuonislanti Tourism Collaborative Governance and Rural Community Development in Finland : The Case of Vuonislanti, (April 2017). <https://doi.org/10.1177/0047287517701858>
 10. Muhammad, A. S. (2017). Collaborative Governance Model in Managing International Borders in Riau Islands Province using Partial Least Squares Method, 21(November), 166–179.
 11. Newman, J., Barnes, M., Sullivan, H., & Knops, A. (2004). Public Participation and Collaborative Governance, (April). <https://doi.org/10.1017/S0047279403007499>